

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN YANG BAIK	KONDISI SAPRAS YANG Mendukung PELAYANAN	PENINGKATAN PERANGKAT Mendukung PELAYANAN	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	
	TERSELESAIKANNYA PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN KEPENDUDUKAN	TERSEDIANYA PENGADUAN MASYARAKAT DI MEDIA MASA	TERSEDIANYA RUAN POJOK PENGADUAN DI MEDIA MASA	
	MENINGKATNYA KECEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		MENINGKATKAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	PENYEDIAAN PELAYANAN ON-LINE DAN KELILING
			APLIKASI DAN JARINGAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN ON-LINE	PELAKASANAAN PELAYANAN KELILING
	MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		TERTIBNYA PELAPORAN LAMPID	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT PENTINGNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
			TERTIBNYA PELAPORAN PERUBAHAN STATUS	
			PENYEDIAAN BLANGKO KTP	MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI YANG BERWENANG DALAM PENYEDIAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

TERWUJUDNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	TERWUJUDNYA VALIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN	TERWUJUDNYA DATABASE KEPENDUDUKAN UNTUK SEMUA KEPERLUAN	SOSIALISASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
			AKURASI DATA
			KERJASAMA

Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, yaitu :

1. Memanfaatkan dukungan DPRD untuk menunjang komitmen pegawai dalam menghadapi tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan mendorong semangat pihak kecamatan dan kelurahan dalam melayani masyarakat melalui perumusan dan aturan perundangan yang relevan dan akomodatif.
2. Memanfaatkan komitmen pegawai yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang syarat dan tata cara pengurusan dokumen kependudukan dan menyelesaikan tunggakan kerja pada waktu tertentu.
3. Menghabiskan praktek percaloan dengan memberikan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan.
4. Memanfaatkan dukungan DPRD untuk mengisi keterbatasan sumber daya aparatur dan memperbaiki kondisi kantor agar representatif dalam
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk menyelesaikan tunggak kerja pada waktu tertentu.
6. Memperbaiki kondisi kantor untuk menghapuskan praktek percaloan.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut Dinas Kependudukan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan Updating database untuk optimalisasi pelayanan

2. Mendukung upaya operasional tugas kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Melakukan sosialisasi atas produk, persyaratan, tata cara pelayanan dan perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan.
4. Meminta penambahan pegawai untuk menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin meningkat.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, di antaranya dengan pihak berwajib untuk menghabiskan percaloan dalam pelayanan yang merugikan masyarakat.
6. Menyusun anggaran untuk tenaga ahli komputer untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia dalam penyelesaian pekerjaan dan mengatasi tunggakan kerja pada waktu tertentu.
7. Menyusun anggaran untuk pembangunan kantor baru yang lebih representatif dalam proses pelayanan.
8. Menambah tenaga ahli komputer untuk mengisi kekurangan sumberdaya manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi tunggakan kerja pada waktu tertentu